

## FORMAT PENGISIAN LKPJ TA 2023

### A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKU) Pemerintah Daerah  
Bapenda Kabupaten Brebes  
T.A 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rp (Miliar)	419,395	430,500	479,936

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

a. Penjelasan indikator yang dimaksud/tujuan/rincian data indikator tsb

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes memiliki kontribusi dan keterkaitan dalam pencapaian visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes tahun 2023-2026, yaitu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif sebagaimana dijabarkan dalam dalam misi RPD yang ketiga. Salah satu sasaran dari misi ketiga tersebut adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Optimalisasi Aset secara Efisien dan Produktif serta Mendorong Tertib Administrasi Keuangan Daerah, dengan indikator pencapaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan tugas Bapenda yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB, maka Bapenda menetapkan salah satu tujuannya adalah Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak-pajak daerah yang dicapai oleh Bapenda.

b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kondisi awal tahun 2022

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 479,936 miliar atau 111,483% dari target Rencana Pembangunan Daerah. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 419,395 miliar, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 60,541 miliar atau naik sebesar 14,435%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi

Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah yang tercapai sebesar Rp. 479.936.145.391,01 atau sebesar 97,54% dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023 sebesar Rp. 492.051.389.008. Secara umum realisasi pendapatan belum sesuai dengan rencana, dikarenakan:

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Masih banyak pengusaha sebagai subjek pajak/subjek retribusi yang belum menerapkan konsumen sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Anggapan masyarakat bahwa reward yang diberikan pemerintah dirasakan belum maksimal atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibayarkan
- d. Masih lemahnya penegakkan hukum terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, dan penyalahgunaan pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan operasional untuk peningkatan pajak dan retribusi daerah

## 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKD) Pemerintah Daerah  
Bapenda Kabupaten Brebes  
T.A 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	%	86,63	83	86,75
2	Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	%	102,74	100	98,34
3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rp (Miliar)	419,395	430,500	479,936

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

- a. Penjelasan indikator yang dimaksud/tujuan/rincian data indikator tsb

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes memiliki kontribusi dan keterkaitan dalam aspek pelayanan umum unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan indikator kinerja pembangunan daerah adalah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bapenda dan Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah. Pada aspek daya saing, Bapenda berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kondisi awal tahun 2022

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bapenda tahun 2023 senilai 86,75 mengalami kenaikan senilai 0,12 dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bapenda tahun 2022 senilai 86,63. Survey dilaksanakan dengan membagikan kuesioner kepada 100 orang responden dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023.

Angka Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah pada tahun 2023 sebesar 98,34% mengalami penurunan sebesar 4,4% dari Angka Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah tahun 2022, yaitu sebesar 102,74%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 479,936 miliar atau 111,483% dari target Rencana Pembangunan Daerah. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 419,395 miliar, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 60,541 miliar atau naik sebesar 14,435%.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi

Ada beberapa hambatan/kendala dalam proses pencapaian target pajak daerah tahun 2023, antara lain:

- a. Adanya aksi penolakan terhadap produk-produk pro israel berpengaruh terhadap penurunan omzet penjualan pada Starbuck dan Mc Donald yang memberikan kontribusi setoran pajak restoran bulanan yang cukup tinggi
- b. Banyak space baliho di tempat strategis dengan nilai pajak yang besar tidak terisi, dampak dari pengurangan belanja pemasangan reklame di perusahaan-perusahaan
- c. Tingkat kunjungan ke lokasi yang memiliki lahan parkir sebagai objek pajak mengalami penurunan
- d. Penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan pada dokumen rencana penambangan masing-masing wajib pajak lima tahunan, namun realisasi tidak sesuai dengan rencana penambangan karena beberapa faktor, antara lain berkurangnya permintaan pasar, kebijakan internal wajib pajak, faktor cuaca.
- e. Belum ada sanksi yang mengikat kepada wajib pajak dan tindakan hukum bagi perangkat desa yang menggunakan uang setoran PBB, serta tempat-tempat pembayaran PBB yang tersedia belum memadai.

Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah yang tercapai sebesar Rp. 479.936.145.391,01 atau sebesar 97,54% dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023 sebesar Rp. 492.051.389.008. Secara umum realisasi pendapatan belum sesuai dengan rencana, dikarenakan:

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Masih banyak pengusaha sebagai subjek pajak/subjek retribusi yang belum menerapkan konsumen sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah

- c. Anggapan masyarakat bahwa reward yang diberikan pemerintah dirasakan belum maksimal atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibayarkan
- d. Masih lemahnya penegakkan hukum terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, dan penyalahgunaan pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan operasional untuk peningkatan pajak dan retribusi daerah

### 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Bapenda Kabupaten Brebes  
T.A 2023

NO	PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	%	82	83	86,75
2	Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	%	102,74	100	98,34
3	Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem yang Menerima Stimulus Pembayaran PBB	Orang	0	3000	3000

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

- a. Penjelasan indikator yang dimaksud/tujuan/rincian data indikator tsb

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan penyesuaian tujuan dan sasarannya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Peningkatan kualitas pelayanan Bapenda dapat dilihat atau diukur dari nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dicapai oleh Bapenda.

Dalam upaya untuk mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes, salah satu nya dapat ditempuh melalui peningkatan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak-pajak daerah yang dicapai oleh Bapenda.

Sedangkan untuk peningkatan perekonomian daerah atau dalam rangka mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes, upaya yang dapat dilakukan Bapenda adalah dengan pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrem dan masuk dalam ketetapan pajak buku I (wajib pajak dengan ketetapan 0 sampai dengan Rp. 100.000)

- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kondisi awal tahun 2022

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bapenda tahun 2023 senilai 86,75 mengalami kenaikan senilai 0,12 dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bapenda tahun 2022 senilai 86,63. Survey dilaksanakan dengan membagikan kuesioner kepada 100 orang responden dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023.

Angka Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah pada tahun 2023 sebesar 98,34% mengalami penurunan sebesar 4,4% dari Angka Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah tahun 2022, yaitu sebesar 102,74%.

Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem yang telah terdata dan terverifikasi di tahun 2023, dan akan Menerima Stimulus Pembayaran PBB pada ketetapan tahun 2024 adalah 3000 wajib pajak, yang tersebar di 145 desa, 12 kecamatan di Kabupaten Brebes.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi

Ada beberapa hambatan/kendala dalam proses pencapaian target pajak daerah tahun 2023, antara lain:

- a. Adanya aksi penolakan terhadap produk-produk pro israel berpengaruh terhadap penurunan omzet penjualan pada Starbuck dan Mc Donald yang memberikan kontribusi setoran pajak restoran bulanan yang cukup tinggi
- b. Banyak space baliho di tempat strategis dengan nilai pajak yang besar tidak terisi, dampak dari pengurangan belanja pemasangan reklame di perusahaan-perusahaan
- c. Tingkat kunjungan ke lokasi yang memiliki lahan parkir sebagai objek pajak mengalami penurunan
- d. Penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan pada dokumen rencana penambangan masing-masing wajib pajak lima tahunan, namun realisasi tidak sesuai dengan rencana penambangan karena beberapa faktor, antara lain berkurangnya permintaan pasar, kebijakan internal wajib pajak, faktor cuaca.
- e. Belum ada sanksi yang mengikat kepada wajib pajak dan tindakan hukum bagi perangkat desa yang menggunakan uang setoran PBB, serta tempat-tempat pembayaran PBB yang tersedia belum memadai.

#### 4. Capaian Kinerja Program Pembangunan

Capaian Indikasi Rencana Program Prioritas  
Bapenda Kabupaten Brebes  
T.A 2023

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	%	86,63	83	86,75
2	Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Miliar Rupiah	75,72	64,4	84,66
3	Peningkatan PBB dan BPHTB	Miliar Rupiah	74.60	69,5	95,15
4	Pemberian Stimulus Pembayaran PBB untuk Masyarakat Miskin	Orang	0	3000	3000

Keterangan/Pembahasan tabel meliputi :

a. Penjelasan indikator yang dimaksud/tujuan/rincian data indikator tsb

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Peningkatan kualitas pelayanan Bapenda dapat dilihat atau diukur dari nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dicapai oleh Bapenda.

Dalam upaya untuk mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes, salah satunya dapat ditempuh melalui peningkatan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak-pajak daerah yang dicapai oleh Bapenda, yang terdiri dari pajak daerah **non** PBB dan BPHTB, dan pajak daerah PBB dan BPHTB.

Sedangkan untuk peningkatan perekonomian daerah atau dalam rangka mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes, upaya yang dapat dilakukan Bapenda adalah dengan pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam ketetapan pajak buku I (wajib pajak dengan ketetapan 0 sampai dengan Rp. 100.000)

b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kondisi awal tahun 2023

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bapenda tahun 2023 senilai 86,75 mengalami kenaikan senilai 0,12 dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bapenda tahun 2022 senilai 86,63. Survey dilaksanakan dengan membagikan kuesioner kepada 100 orang responden dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023.

Realisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 84,66 miliar atau 131,45% dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp 64,4 miliar. Dibandingkan dengan pencapaian realisasi di tahun 2022 sebesar Rp. 75,72 miliar, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,94 miliar atau 11,81%.

Realisasi Pajak Daerah berupa PBB dan BPHTB pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 95,15 miliar atau 136,91% dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rp 69,5 miliar. Dibandingkan dengan pencapaian realisasi di tahun 2022 sebesar Rp. 74,60 miliar, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20,55 miliar atau 27,55%.

Jumlah masyarakat dengan kategori Miskin Ekstrim yang telah terdata dan terverifikasi di tahun 2023, selanjutnya akan menerima Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada ketetapan tahun 2024 sejumlah 3000 wajib pajak, tersebar di 145 desa, 12 kecamatan di Kabupaten Brebes.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi

Ada beberapa hambatan/kendala dalam proses pencapaian target pajak daerah tahun 2023, antara lain:

- a. Adanya aksi penolakan terhadap produk-produk pro israel berpengaruh terhadap penurunan omzet penjualan pada Starbuck dan Mc Donald yang memberikan kontribusi setoran pajak restoran bulanan yang cukup tinggi
- b. Banyak space baliho di tempat strategis dengan nilai pajak yang besar tidak terisi, dampak dari pengurangan belanja pemasangan reklame di perusahaan-perusahaan
- c. Tingkat kunjungan ke lokasi yang memiliki lahan parkir sebagai objek pajak mengalami penurunan
- d. Penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan pada dokumen rencana penambangan masing-masing wajib pajak lima tahunan, namun realisasi tidak sesuai dengan rencana penambangan karena beberapa faktor, antara lain berkurangnya permintaan pasar, kebijakan internal wajib pajak, faktor cuaca.
- e. Belum ada sanksi yang mengikat kepada wajib pajak dan tindakan hukum bagi perangkat desa yang menggunakan uang setoran PBB, serta tempat-tempat pembayaran PBB yang tersedia belum memadai.

**5. Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak dan Kegiatan dan sub kegiatan meliputi keluaran / hasil dari pelaksanaan kegiatan**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Output Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Outcome Kegiatan	: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Output Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Outcome Kegiatan	: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	: a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik kantor

		<p>e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</p> <p>f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
Output Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
Outcome Kegiatan	:	<p>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Pengandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Output Kegiatan	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Outcome Kegiatan	:	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	:	<p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
Output Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat</li> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</li> </ul>
Outcome Kegiatan	:	<p>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	:	<p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan</p>

		Lainnya
	Output Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</li> <li>• Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</li> <li>• Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</li> </ul>
	Outcome Kegiatan	: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tujuan Program	:	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Dampak Program	:	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
Manfaat Program	:	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Sub Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</li> <li>c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</li> <li>d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</li> <li>e. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB)</li> <li>f. Penetapan Pajak Daerah</li> <li>g. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</li> <li>h. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</li> <li>i. Penagihan Pajak Daerah</li> <li>j. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</li> <li>k. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>l. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>m. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</li> </ol>
	Output Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</li> <li>• Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</li> <li>• Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>• Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</li> </ul>
	Outcome Kegiatan	: Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen) Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)

Tujuan Program	:	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
Dampak Program	:	Meningkatnya penerimaan pajak daerah
Manfaat Program	:	Meningkatnya penerimaan pajak daerah

## 6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

### Anggaran dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah T.A 2023

NO	URAIAN	BELANJA		(% )
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Pajak Hotel	550.000.000	568.617.536	103,39
2	Pajak Restoran	7.000.000.000	6.839.054.444	97,70
3	Pajak Hiburan	500.000.000	507.309.059	101,46
4	Pajak Reklame	4.200.000.000	4.086.338.840	97,29
5	Pajak Penerangan Jalan	69.000.000.000	69.634.476.123	100,92
6	Pajak Parkir	600.000.000	527.671.946	87,95
7	Pajak Air Tanah	950.000.000	1.027.815.270	108,19
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.050.000.000	1.468.066.365	29,07

NO	URAIAN	BELANJA		(% )
		ANGGARAN	REALISASI	
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	55.000.000.000	54.692.342.726	99,44
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	40.000.000.000	40.463.879.116	101,16
	<b>JUMLAH</b>	<b>182.850.000.000</b>	<b>179.815.571.425</b>	<b>98,34</b>

Anggaran dan Realisasi Belanja  
Badan Pendapatan Daerah  
T.A 2023

NO	URAIAN	BELANJA		(% )
		ANGGARAN	REALISASI	
	Belanja Operasi	18.801.156.735	17.915.208.751	95,29
	Belanja Modal	54.300.000	54.028.000	99,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.855.456.735</b>	<b>17.969.236.751</b>	<b>95,30</b>

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Badan Pendapatan Daerah  
T.A 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.035.000	24.535.000	98,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.035.000	24.535.000	98,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.563.243.288	10.975.491.585	94,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.563.243.288	10.975.491.585	94,92
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	738.037.707	711.747.716	96,44
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.400.000	9.395.200	99,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.434.000	41.278.000	99,62
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.754.000	32.440.000	96,11
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.435.000	79.330.500	97,42
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.560.000	42.560.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	529.454.707	506.744.016	95,71

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	SKPD			
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.300.000	4.300.000	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	4.300.000	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.067.916.500	1.013.222.489	94,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.685.000	16.685.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.362.500	74.128.446	88,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	967.869.000	922.409.043	95,30
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.936.000	263.511.131	85,85
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.910.000	110.047.977	80,97
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.030.000	107.376.154	88,72
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.996.000	46.087.000	92,18
	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	5.149.988.240	4.976.428.830	96,63
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.149.988.240	4.976.428.830	96,63
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	44.966.000	41.936.500	93,26
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	35.483.000	22.470.000	63,33
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	366.959.800	319.731.490	87,13
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.305.640.500	2.283.853.298	99,06
	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000	2.870.000	95,67
	Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah	232.206.000	217.327.000	93,59
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	20.895.000	20.275.600	97,04
	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	60.000.000	26.567.500	44,28

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1.859.572.440	1.834.244.142	98,64
	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35.000.000	29.981.000	85,66
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	39.985.000	35.096.800	87,77
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	131.300.000	127.868.500	97,39
	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	14.980.500	14.207.000	94,84
	Jumlah	18.855.456.735	17.969.236.751	95,30

**7. Penghargaan yang didapat di tahun 2023 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional)**

- a. -
- b. -
- c. -

**B. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 83	Nilai 86.75		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan (Renja, RKA, DPA, Lap. Keuangan, LKjIP, Laporan Evaluasi Renja)		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan (Renja, RKA, DPA, Lap. Keuangan, LKjIP, Laporan Evaluasi Renja)		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	60 Orang		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	60 Orang	60 Orang		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Gaji dan Tunjangan ASN				
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	31 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun		
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000 Laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	4 Laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	5 Unit		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit		
				<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	87,85 Milliar Rupiah	84,67 Milliar Rupiah		
					Peningkatan PBB dan BPHTB	95 Miliar Rupiah	95,16 Miliar Rupiah		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	7 Dokumen	7 Dokumen		
					Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pendataan	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				
				Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan		
				Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1500 Obyek Pajak	1500 Obyek Pajak		
				Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1000 Dokumen	1000 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB)	3 Layanan	3 Layanan		
				Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Penagihan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB)				
				Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan		
				Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan		

Brebes, Mei 2024  
 Kepala Bapenda Kabupaten Brebes  
  
**SUBANDI, S.E., M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19690711 199103 1 010